

Pasca-terungkapnya praktek perbudakan ini, tim Satgas dan aparat setempat melakukan evakuasi terhadap ABK. Dari 341 ABK Myanmar, 281 di antaranya dipindahkan ke Tual-- 60 ABK sisanya masih bertahan di Benjina, dengan alasan masih menunggu gaji, ataupun keberatan karena telah menikah dengan warga lokal. Adapun ABK Kamboja dan Laos, masing-masing berjumlah 58 dan delapan orang, sudah diungsikan ke Tual. Sedangkan ABK Thailand, berjumlah 746, semuanya masih bertahan di Benjina.

Sejauh ini, menurut Wakapolri Komjen Badroedin Haiti, polisi telah menahan dua tersangka dari PT PBR. "Sangkaan penganiayaan terhadap ABK," kata Badroedin, Senin lalu. Badroedin tidak menyebut nama tersangka. Menurut informasi dari Ditjen PDKDP, salah satu tersangka, bernama Yopi, ditahan di Kepolisian Resor Aru.

Tersangka diduga melakukan penganiayaan berdasarkan laporan tiga ABK non-Thailand yang menjadi korban. Penangkapan ini merupakan respons kepolisian terhadap temuan Dirjen PSDKP Asep Burhanudin menyangkut dugaan penganiayaan oleh Yopi. Sebelumnya, Asep berkoordinasi dengan Kepolisian Daerah Maluku.

\*\*\*

Dugaan praktek perbudakan dan *illegal fishing*, serta pelanggaran lainnya di lingkungan PT PBR ini diperkirakan sudah berlangsung bertahun-tahun. Kondisi ini sulit terpantau, karena letaknya yang jauh, juga minimnya aparat keamanan terkait di daerah itu. Selain itu, aparat tersebut diduga rutin mendapat uang pelicin dari PT PBR. Menurut Hermanwir, uang pelicin yang ditaburnya itu sekitar Rp 37 juta setiap bulannya.

Semua dugaan praktek busuk PT PBR ini baru mencuat akhir Maret lalu

### Dugaan Pelanggaran PT PBR

- Perdagangan manusia, pelanggaran HAM yang menurus ke perbudakan, khususnya terhadap ABK asal Myanmar, Kamboja dan Laos
- Diskriminasi pemberian upah
- Manipulasi dokumen keimigrasian
- Penggunaan kapal asing
- Penggunaan alat tangkap tidak sesuai izin
- Kapal tidak berlabuh di pangkalan
- Kapal tidak menyalakan *vessel monitoring system* (VMS)
- Melakukan *transshipment*
- Pelanggaran pajak

Sumber: Temuan Satgas Anti-Illegal Fishing dan Ditjen PSDKP



Sejumlah ABK warganegara Thailand saat akan dipulangkan ke negaranya

setelah kantor berita asing *Associated Press* menerbitkan hasil investigasinya berjudul *Was Your Seafood Caught by Slaves*, pada edisi 25 Maret 2015. Pemberitaan itu membuat Duta Besar Thailand untuk Indonesia, Siriyaphan, bersama Wakil Kepolisian Letjen Siridchai Anakeveing berkunjung ke Ambon, Dobo, dan Benjina, guna melakukan investigasi.

Investigasi AP memang lebih fokus pada masalah perbudakan. Setelah tim Satgas Anti-Illegal Fishing menindaklanjuti, ditemukan pula berbagai dugaan pelanggaran lainnya. Ketika Menteri KKP, Susi Pudjiastuti, menyimak berita AP yang mencuat, kemudian mendapat laporan awal dari tim Satgas, sang Menteri kontan geregetan. "Terlebih kala itu aparat hukum setempat membantah terjadinya perbudakan.

Dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, 1 April lalu, Menteri Susi menumpahkannya kekesalannya. "Kalaupun ini bukan dianggap perbudakan, tak tahu lagi saya apa namanya itu. Tak pantas diperlakukan manusia seperti ini kalau cuma untuk industri perikanan," kata Susi, yang mengaku tak bisa enak makan akibat pemberitaan soal perbudakan tersebut.

Susi Pudjiastuti menyatakan kekawatirannya, karena dugaan perbudakan di Benjina bisa berdampak besar bagi produk perikanan asal Indonesia bila pemerintah tidak bertindak cepat dan tegas. Pasalnya, Uni Eropa dan Amerika Serikat berpotensi memboikot produk perikanan Tanah Air. Saat ini, Amerika Serikat telah memboikot produk PT PBR yang dikirim ke Thailand, kemudian diekspor ke "negeri Paman Sam" tersebut.

Karena itu, Susi telah memerintahkan menghentikan sementara pengi-

riman produk perikanan yang dihasilkan PT PBR. "Saya sudah minta produk Benjina tidak boleh keluar dulu dari Benjina," kata Susi pekan lalu. Tujuannya, agar kasus Benjina tidak berdampak terhadap para pelaku usaha lain. Susi juga mengancam akan mencabut izin usaha perikanan PT PBR.

Ketua Komisi IV DPR, Edhy Prabowo, mendesak Pemerintah untuk bertindak secepatnya menuntaskan kasus Benjina, terutama kasus perbudakannya. "Indonesia harus jauh dari tindakan perbudakan," kata Edhy. Hal senada dilontarkan Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Riza Damanik. Ia mengingatkan pula bahwa kasus ala PT PBR bukan tidak mungkin juga terjadi di tempat terpencil lainnya.

Riza mengusulkan agar Pemerintah membuka posko pengaduan. Selain untuk menghindari terulangnya kejadian yang sama, posko tersebut juga menampung pengaduan dari perusahaan yang boleh jadi selama ini diperas oknum petugas terkait. "Nantinya diharapkan tidak ada lagi praktek perbudakan, juga praktek pemerasan," kata Riza.

Reaksi Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) lebih keras lagi. LSM ini mendesak pemerintah melakukan penuntutan terhadap PT PBR. KIARA juga mengingatkan Pemerintah agar mengatur hubungan kerja antara ABK dan perusahaan. Di antaranya, mewajibkan perjanjian kerja, memastikan persyaratan minimum pekerja terpenuhi, dan penguangan terhadap organisasi serikat pekerja nelayan. ■

TAUFIK ALWIE,

JONI ASWIRA PUTRA, HIDAYAT ADHINGRAT,  
ANTHONY DJAFAR, DAN ADITYA KIRANA

## Nestapa Perbudakan Benjina

**P**raktek perbudakan yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources sungguh mengiris nurani. Para pekerja di perusahaan yang berbasis di Kepulauan Aru, Maluku, itu dipaksa bekerja sampai 22 jam, dipukuli dengan ekor ikan pari yang berduri, tak diberi makan, dan ada yang tak digaji.

Sulit diterima akal sehat bila perbudakan yang berlangsung selama lebih dari 10 tahun itu tak pernah terendus penegak hukum. Karena itu, pemerintah harus menumpas tuntas kejahatan PT Benjina.

Praktek perbudakan Benjina itu terbongkar oleh investigasi kantor berita *Associated Press* beberapa pekan lalu. Tim Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing Kementerian Kelautan dan Perikanan lalu turun tangan dan mendapati 322 warga negara asing bekerja dalam kondisi mengenaskan di pabrik perusahaan Thailand tersebut. Para pekerja diperlakukan sewenang-wenang: disekap, disiksa, bahkan diduga juga ada yang dibunuh, karena ditemukan kuburan di sana.

Kasus ini merupakan tamparan keras buat Indonesia, yang telah meratifikasi keputusan International Labor Organization (ILO) tentang perburuhan. Ada kesan pemerintah masih sekadar menjadi "pemadam kebakaran" dalam kasus Benjina. Padahal adanya penyiksaan itu sudah lama diketahui warga sekitar. Pertanyaannya, mengapa aparat bungkam?

Kuat dugaan kasus ini juga melibatkan penegak hukum. Prasangka buruk ini gampang muncul karena riwayat perbudakan oleh perusahaan ini telah berlangsung lama. Penerbitan izin untuk sejumlah kapal Benjina juga aneh, karena izin itu keluar justru setelah moratorium izin diberlakukan. Benjina sendiri pada 2007 pernah dikunjungi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Persoalan Benjina ini cukup pelik karena semua "budak" itu berkewarganegaraan asing. Kebanyakan dari Myanmar, Kamboja, dan sisanya dari Laos. Ini saja sudah membuat kasus Benjina harus dibicarakan di tingkat ASEAN. Thailand harus didesak agar tak melindungi Benjina. Harus ada langkah bersama dengan negara ASEAN lainnya agar eksploitasi pekerja lintas negara itu tak terulang.

Kasus Benjina berkaitan dengan komoditas perikanan yang sedang digadag-gadag pemerintah sebagai pendulang devisa. Bila tak diselesaikan dengan segera, negara-negara pengimpor produk ini, seperti Amerika dan negara di Eropa, bisa bereaksi negatif. Amerika Serikat bahkan sudah memperingatkan bahwa kasus Benjina bisa membuat produk perikanan Indonesia berpotensi diboikot.

Pemerintah seyogianya segera mengusut semua yang terlibat kasus ini, termasuk pejabat yang selama ini menutupi kasus ini. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mensinyalir ada uang bulanan yang mengalir ke para aparat. Kasus Benjina merupakan pil pahit.

Pemerintah harus menyelidiki kasus serupa di banyak perusahaan perikanan. Sebab, saat ini ditengarai masih banyak praktek perbudakan terjadi di industri perikanan. Pemerintah harus mencegah terulangnya praktek perbudakan di sektor perikanan. Jika tak ditangani secara serius, kasus ini bisa menjadi mimpi buruk bagi Indonesia. ●

Republika, Jumat 10 April 2015 (5)

## Sanksi untuk Perusahaan Pelaku Perbudakan

**K**asus perbudakan pekerja di perusahaan perikanan PT Pusaka Benjina Resources (PBR) mendapat respons dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Perusahaan tersebut terancam pencabutan izin usaha.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti merekomendasikan BKPM untuk mencabut izin usaha perikanan PT PBR. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti rekomendasi itu dengan mengacu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala (Perka) BKPM Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

Franky menyebutkan, sanksi pencabutan izin kegiatan usaha merupakan sanksi tertinggi dalam bidang penanaman modal. Sanksi tersebut diberikan secara bertahap apabila perusahaan melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan penanaman modal.

Franky juga menggarisbawahi bahwa dalam Perka BKPM Nomor 3 Tahun 2012 Pasal 6 huruf e dan f menyatakan bahwa setiap penanam modal bertanggung jawab menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja, serta penanam modal mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan. Sesuai aturan, penerapan sanksi dapat dilakukan secara langsung sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, dalam UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, khususnya Pasal 15 dan 16, sudah diatur kewajiban dan tanggung jawab dari investor atau penanam modal. Kewajiban itu, antara lain menerapkan prinsip tata

kelola perusahaan yang baik, membuat dan menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal, serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Selanjutnya itu tanggung jawab penanam modal atau investor, antara lain menjaga kelestarian lingkungan hidup dan menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja," ujar Franky, di Jakarta, Kamis (9/4).

Perbudakan di Benjina sendiri melibatkan ratusan anak buah kapal asal Myanmar yang dipekerjakan oleh PT PBR. Mereka juga dilaporkan mengalami tindak kekerasan fisik. Sedikitnya 330 ABK asal Myanmar yang masih berada di Tual, Maluku, menunggu proses pemulangan.

Secara resmi pemerintah sudah mencabut Surat Izin Kapal Penangkap Ikan (SIKPI) milik PT Pusaka Benjina Resources (PBR) yang dinilai telah melakukan aksi perbudakan terhadap ratusan anak buah kapal (ABK) dari Myanmar.

Susi mengungkapkan bahwa kasus perbudakan di Benjina telah menjadi berita dunia. Sebelum *Associated Press* mengangkat isu perbudakan di Benjina, media Inggris, *Guardian*, juga sempat mengangkat kasus ini.

"Perbudakan bukan hal baru. Setelah kita tindak lanjuti banyak hal yang ditemukan. Saya memerangi *illegal fishing* ini bukan hanya kerugian ekonomi yang dialami negara kita, tapi karena pendapatan nelayan juga susah," ungkapnya.

Itulah mengapa, lanjut Susi, dirinya selama ini terlihat sangat gencar memberangus penangkapan ikan ilegal. Dia menilai *illegal fishing* berkaitan dengan tindak kriminal lainnya, seperti perdagangan manusia, penyelundupan, dan perbudakan. ■ c85/c87 ed: nur aini





# Korban Perbudakan Pulang ke Thailand

**S**EBANYAK 69 nelayan Thailand diterbangkan ke negara asalnya dengan menggunakan pesawat militer negeri itu dari Pangkalan Udara TNI-AU Pattimura, Ambon, Maluku, kemarin. Di antara mereka, ada 10 nelayan yang menjadi korban perbudakan di PT Pusaka Benjina Resources di Pulau Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.

Pemulangan mereka dilepas oleh Duta Besar Thailand untuk Indonesia, Paskorn Siriyaphan dan disaksikan Komandan Lanud Pattimura Kolonel Penerbang Bob Panggabean, Kepala Imigrasi Ambon Nanang Koesdarjanto dan Kepala Imigrasi Tual Rudiara.

Para nelayan Thailand itu dibawa

dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Ambon, kemarin. Mereka mendapat perlakuan layaknya penumpang penerbangan biasa.

Petugas Imigrasi dan Bea Cukai Ambon dengan teliti memeriksa satu per satu barang bawaan mereka. Setelah itu, mereka juga diperiksa anggota Paskhas TNI-AU, saat hendak naik pesawat jenis Hercules milik militer Thailand.

Wajah para nelayan itu tampak bagia meski beberapa di antara tampak menderita luka di wajah. Bahkan, seorang nelayan pulang tanpa satu kaki karena telah diamputasi, setelah mengalami kecelakaan kerja.

"Mereka bisa dipulangkan atas kerja

sama Imigrasi dan Kedutaan Besar Thailand. Selain 10 korban perbudakan di Benjina, nelayan lain dipulangkan karena tidak memiliki dokumen keimigrasian," kata Kepala Imigrasi Ambon Nanang Koesdarjanto.

Penerbangan dari Ambon ke Bangkok akan ditempuh dalam waktu 8 jam lebih. Nanang menyatakan proses pemulangan nelayan Thailand dari Maluku akan terus dilakukan.

Saat ini masih ada sekitar 600 nelayan Thailand di Benjina, juga 347 nelayan asal Myanmar, Kamboja dan Laos, yang berada di Kota Tual. Mereka ditampung di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual. Mereka ialah korban perbudakan di PT Pu-

saka Benjina.

"Kami berharap kedutaan besar negara asal para nelayan itu dapat memperhatikan warga negara mereka, sehingga bisa cepat dipulangkan," lanjut Nanang.

Di Banyuwangi, Jawa Timur, aksi mogok 14 kapal jenis LCT, yang biasa beroperasi di penyeberangan Ketapang-Gilimanuk, Bali, masih terus berlanjut. Akibatnya, ratusan kendaraan pengangkut barang mengular hingga keluar area parkir Pelabuhan Ketapang. Untuk sementara, otoritas pelabuhan mengoperasikan tiga armada kapal untuk mengangkut kendaraan barang menuju Pelabuhan Gilimanuk, Bali. (HJ/KH/N-3)

# Polri Koordinasi dengan Polisi Myanmar

JAKARTA, KOMPAS — Kepolisian Negara Republik Indonesia bekerja sama dengan polisi Myanmar menyelidiki dugaan perdagangan manusia yang dilakukan perusahaan perikanan PT Pusaka Benjina Resources di Pulau Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku. Ratusan anak buah kapal yang mayoritas berasal dari Myanmar diduga dipalsukan identitasnya.

Anggota satuan tugas perdagangan manusia Badan Reserse Kriminal Polri, Ajun Komisaris Besar Arie Dharmanto, mengungkapkan, sejumlah polisi Myanmar direncanakan tiba Rabu (15/4). Mereka akan berkoordinasi dengan penyidik Polri untuk mengungkap perdagangan manusia yang dilakukan PT Pusaka Benjina Resources (PBR).

Kedatangan polisi Myanmar tersebut tidak lepas dari ratusan warga negara Myanmar yang menjadi korban perdagangan manusia.

"Mereka (polisi Myanmar) akan bersama-sama dengan kami mengusut kasus tersebut. Ada indikasi pelaku berasal dari Indonesia, Myanmar, dan Thailand," kata Arie di Jakarta, Senin (13/4).

Ia menjelaskan, penyelidikan yang telah dilakukan Polri sejak kasus tersebut terungkap akhir Maret mengungkap dugaan modus perdagangan manusia dengan iming-iming bekerja di luar negeri.

Ia mencontohkan, ratusan warga Myanmar dijanjikan bekerja di Thailand, tetapi ketika tiba di Thailand mereka hanya mengurus sejumlah dokumen yang ternyata untuk memalsukan dokumen diri mereka.

Warga negara Myanmar itu selanjutnya menuju Indonesia. Sebelum tiba di Indonesia, pelaku telah mengubah identitas mereka menjadi warga negara Thailand. Ketika bekerja di PT PBR, kata Arie, seluruh anak bu-

ah kapal (ABK) itu tidak mendapatkan bayaran. Bahkan ketika mereka menanyakan hak mereka untuk menerima upah, pelaku malah mengurung mereka.

"Ketika mereka menanyakan gaji, ABK akan langsung dimasukkan ke dalam sel. Kini, kami masih terus mendalami penyelidikan untuk menetapkan para tersangka," katanya.

Para tersangka diduga berasal dari berbagai pihak, seperti perusahaan swasta dan oknum pejabat terkait. Ia menambahkan, para tersangka akan disangkakan Pasal 2, 3, 4, 8, dan 13 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman pidana paling lama 15 tahun penjara, serta denda maksimal Rp 600 juta.

Sebelumnya diberitakan kasus perbudakan nelayan pada kapal-kapal ikan ditengarai tidak hanya berlangsung di Benjina, tetapi ju-

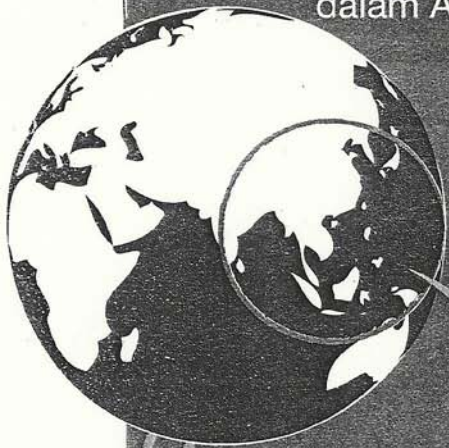
ga berlangsung pada banyak perusahaan penangkapan ikan di Indonesia. Kasus perbudakan harus dituntaskan agar tidak menyeret dan merugikan industri perikanan nasional.

Pekan lalu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Laksamana (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno mengatakan, pemerintah akan segera membuka kasus Benjina dan melakukan proses hukum. Pihaknya berharap kasus ini tidak berlarut-larut dan tidak berdampak merugikan industri perikanan Indonesia secara keseluruhan.

Tedjo mengemukakan, pemerintah sedang membentuk dua tim satuan tugas (satgas) untuk menangani kasus Benjina dan praktik perikanan ilegal. Kasus yang terjadi di Benjina dinilai bukan perbudakan, tetapi mengarah ke kekerasan. Kekerasan itu antara lain waktu kerja yang tidak terbatas, ABK disiksa, disetrum, dan dihukum. (SAN)



# Perbudakan di Asia Tenggara dalam Angka



Sekitar **35,8 juta** orang di dunia diperkirakan terjerat praktik perbudakan modern.

Dari total itu, **6,5%** ada di Asia Tenggara.



**Thailand 475.300** (0,71% populasi)

Perbudakan modern di Thailand mencakup sistem kerja paksa dan eksploitasi seksual. Buruh migran asal Kamboja, Laos, dan Myanmar diduga turut menjadi korban.

Sektor:



Perikanan dan udang



Garmen



Prostitusi



Pengemis



Manufaktur



Industri agrikultur



**Filipina 261.200** (0,26% populasi)

Di dalam negeri, perbudakan terjadi dalam berbagai bentuk. Selain itu, warga Filipina yang bekerja di luar negeri rentan mengalami perlakuan sewenang-wenang dari perekrut.

Sektor:



Industri gula



Industri ikan kaleng



Prostitusi



Vietnam **322.200** (0,35% populasi)  
 Myanmar **231.600** (0,43% populasi)  
 Kamboja **155.800** (1,02% populasi)  
 Malaysia **142.600** (0,48% populasi)  
 Laos **24.300** (0,35% populasi)  
 Singapura **5.400** (1,10% populasi)  
 Brunei Darussalam **3.000** (0,70% populasi)

# Di Laut Mereka Diperbudak

Tim Satgas Anti-Illegal Fishing menemukan sejumlah dugaan pelanggaran oleh PT Pusaka Benjina Resources. Mulai perbudakan, pemalsuan dokumen imigrasi, hingga praktek *illegal fishing*. Pemerintah didesak segera bertindak tegas.



Sejumlah anak buah kapal Myanmar yang bekerja di PT PBR Benjina, Tual, Maluku

Namanya Kyaw Lin Than, asal Myanmar. Usianya 17 tahun. Wajahnya masih terkesan kanak-kanak, meski kehitaman dan diwarnai guratan pertanda kehidupan laut yang keras. Dengan bahasa ibunya, agak terbata-bata Lin Than mengisahkan pengalaman pahitnya menjadi anak buah kapal (ABK) perusahaan perikanan milik grup PT Pusaka Benjina Resources (PBR). Perusahaan ini bermarkas di Benjina dan menangkap ikan di

Perairan Aru, Maluku.

"Saya bekerja di sini sudah dua tahun," Lin Than mengawali ceritanya. Artinya, ketika mulai bekerja umurnya baru 15 tahun. Kata Lin Than, mulanya ia ikut orang nientau dari Myanmar ke Thailand guna mencari pekerjaan. Ia berharap dapat bekerja di rumah makan. Tiba di Samut Sakhon, Provinsi Samut Sakhon, Thailand, Lin Than dijual kepada orang yang tidak ia kenal --diduga perekrut tenaga kerja untuk dijadikan sebagai ABK kapal ikan.

Lin Than kemudian dibawa berlayar ke Benjina, Kepulauan Aru. Setiba di tujuan, bocah itu mulai mengalami kerasnya kehidupan di kapal penangkap ikan. Selama dua tahun itu ia harus bekerja keras dengan istirahat yang minim. Jika terlihat capek saat bekerja, ia dipukuli petugas keamanan.

Lin Than merupakan satu dari puluhan tenaga kerja di PT PBR yang direlusi tim Satuan Tugas (Satgas) Anti-Illegal Fishing. Diduga ia mendapat perlakuan buruk yang menjurus ke perbudakan. Selain Lin Than, ada pula Nando, kini 19 tahun, juga warga Myanmar yang mengalami nasib serupa. Ia direkrut tiga tahun silam ketika berumur 16 tahun, dibius, lalu dinaikkan ke kapal yang membawanya ke Benjina. Kisah Nando diperoleh tim dari keterangan sejumlah ABK.

Menurut Ketua Satgas Anti-Illegal Fishing Mas Achmad Santosa, sebagian besar ABK itu direkrut dengan berbagai tipu daya. Selain dengan cara dibuat mabuk atau dibius, ada pula yang pura-pura ditawarkan bekerja di satu tempat di Thailand. "Saat naik ke kapal, tahu-tahu tujuan akhirnya Indonesia (di Benjina). Jadi, banyak pengakuan dari mereka sebetulnya tidak ingin jadi nelayan," kata mantan Ptk. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akrab dipanggil Ota itu.

Tim Satgas bentuk Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan dan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman ini selama sepekan lalu melakukan investigasi di Benjina terkait dengan mencuatnya berita dugaan perbudakan, *illegal fishing*, dan pelanggaran lainnya yang dilakukan PT PBR. Tim terdiri dari berbagai unsur --antara lain Kementerian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM, TNI, Polri, dan unsur International Organization for Migration (IOM)-- ini menemukan bukti-bukti bahwa berbagai pelanggaran itu memang ada.

Keterangan yang diperoleh GATRA dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP)/KKP, menyebutkan ada indikasi perdagangan manusia dan pelanggaran HAM yang mengarah ke perbudakan, yang terjadi di PT PBR. Perlakuan buruk ini dialami oleh ABK non-Thailand, yakni ABK asal Myanmar, Kamboja, dan Laos. Sedangkan ABK Thailand diperlakukan sangat baik.

Maklum, perusahaan modal asing ini dikendalikan oleh pengusaha Thailand, dan menggunakan kapal-kapal



Susi Pudjiastuti

Thailand yang berjumlah 96 kapal, hampir semuanya menggunakan nama lambung Antasena disusul seri angka tertentu. Tim Satgas menemukan ada tiga perusahaan Thailand yang memiliki kapal-kapal tangkap di lingkungan PT PBR.

Ketiga perusahaan ini juga ber Kantor di Benjina. Yakni, PT Silver Sea Fishery, Ocean Reach Fishery, dan Thai Hong Huad. PT Silver Sea membagikan upah ke ABK setelah mendapat transfer dari PT PBR. Adapun PT PBR memiliki tiga anak perusahaan, di antaranya PT Pusaka Benjina Nusantara dan PT Pusaka Benjina Armada.

Sejumlah ABK non-Thailand yang diwawancarai petugas mengaku pernah dibebaskan ke tanah oleh pihak sekuriti. Perusahaan ini mempunyai rumah tahanan sendiri, berukuran 6 x 3 meter, lengkap dengan jeruji besi, yang digunakan untuk menahan ABK yang malas atau berkelahi. Ruang tahanan ini biasa dijejali 20 orang. "Kami menjumpai rumah tahanan, tapi tidak ada orangnya. Mungkin karena pemberitaan, kabarnya 20 orang lebih (tahanan) sudah diangkut ke Ambon," sumber di Satgas Anti-Illegal Fishing menjelaskan.

Di perusahaan ini tidak ada alasan sakit atau capek. Jika ABK non-Thailand sakit, bukannya diobati, melainkan malah disetrum. Kalau capek atau tertidur karena kelelahan, langsung dipukuli. Pernah pula, pada akhir 2013, ditemukan dua orang ABK asal Myanmar di perairan Aru dalam kondisi hidup. "Mereka dibuang dari kapal berbendera Thailand," kata Dirjen PSDKP, Asep Burhanudin, dalam keterangan tertulisnya.

PT PBR juga diduga memanipulasi status migrasi ABK-nya, dengan menyebut ABK mereka berjumlah 2.540 itu didominasi warga Thailand, sesuai dengan paspor yang dimiliki. Padahal

yang dominan adalah warga Myanmar, juga banyak warga Kamboja dan Laos. Ternyata, pengakuan ABK non-Thailand --di luar ABK asal Indonesia berjumlah 89 orang-- mereka dihuatkan paspor palsu Thailand. Foto di paspor dan buku dokumen hanya wajah mereka, yang ditempelkan ke badan orang lain.

Dari segi pengupahan, petugas juga menemukan perbedaan kelas. Kelas pertama diduduki ABK Thailand dengan upah Rp 5 juta-Rp 8 juta per bulan, yang ditransfer ke keluarga mereka di kampung halaman. Kelas kedua ditempati ABK Indonesia dengan upah Rp 1,5 juta, dari Rp 3 juta yang dijanjikan. Adapun ABK Myanmar, Kamboja, dan Laos hanya diupah Rp 800.000 per bulan. Beberapa di antara mereka bahkan mengaku tak digaji.

Tim juga menemukan dugaan terjadi pembunuhan atau kematian ABK akibat penyakit. Indikasinya, Satgas dan tim dari Thailand menemukan 77

kuburan warga asing di areal Pantai Benjina. "Apakah di makam itu satu orang atau dua tiga orang, kami masih belum tahu," kata Ota, yang juga belum bisa memastikan sebab kematian orang-orang di kuburan tersebut. Temuan kuburan massal ini tengah ditindaklanjuti kepolisian setempat.

Temuan lainnya, penggunaan alat tangkap tidak sesuai izin, kapal tidak berubah di pangkalan, serta tidak menyalakan *vessel monitoring system* (VMS). Juga ada indikasi melakukan *transshipment* muatan ikan di laut lepas. Dari pantauan data *tracking* AISSat, diketahui kapal angkut Silver Sea Line-2 masih rutin berkeliaran di perairan Sulawesi dan Papua Barat, lalu kembali ke Samut Sakhon.

Diduga kapal angkut ini masih mengangkut ikan dari 34 kapal ikan PT PBR yang tidak diketahui keberadaannya. Semua kapal itu dibekukan izinnya sejak November lalu karena menggunakan ABK asing. "Ngapain kapal angkut Silver Sea masih di laut?" kata Ota. Ia menambahkan, seharusnya pula ke-34 kapal tangkap tersebut sudah kembali ke pelabuhan, tidak bisa beroperasi.

Semua tuduhan miring ini, khususnya menyangkut perbudakan dan adanya sel tahanan, dibantah pihak PT PBR. Menurut Site Operational Departement Head PT PBR, Hermanwir Martino, kalau sel tahanan yang disebut-sebut dalam pemberitaan itu hanyalah rumah penitipan sementara, bukan sel tahanan. "Jadi kalau ada ABK yang mabuk terus berkelahi, mereka dipisahkan ke ruangan ini, rumah penitipan sementara," kata Hermanwir di Benjina.

## Indikasi Kapal PT PBR Dikendalikan Perusahaan Thailand

Perusahaan di Indonesia	Jumlah Kapal	Pemilik di Thailand	
PT. Pusaka Benjina Resources	29 Kapal Perikanan	Silver Sea Fishery	12 Kapal
		Thai Hong Huad	9 Kapal
		Ocean Reach Fishery	8 Kapal
PT. Pusaka Benjina Armada	37 Kapal Perikanan	Silver Sea Fishery	35 Kapal
		Thai Hong Huad	1 Kapal
		Ocean Reach Fishery	1 Kapal
PT. Pusaka Benjina Nusantara	29 Kapal Perikanan	Silver Sea Fishery	23 Kapal
		Thai Hong Huad	5 Kapal
		Ocean Reach Fishery	1 Kapal
PT. Pusaka Bahari	1 Kapal Perikanan	Thai Hong Huad	1 Kapal
<b>Total</b>	<b>96 Kapal Perikanan</b>	<b>96 Kapal Perikanan</b>	

Sumber: PT Silver Sea Fishery



# Perbudakan Modern Coreng Wajah Asia Tenggara

Sebagian besar pekerja yang berasal dari Myanmar dan Kamboja itu sebelumnya mencari pekerjaan di wilayah Thailand.

## DERI DAHURI

**P**ARA pria asal Myanmar itu duduk di atas lantai ubin. Mereka menatap ke luar dengan pandangan hampa melalui celah-celah pagar besi berkarat. Ruang yang berpagar besi dan terkunci itu tidak ubahnya sebuah kandang.

Ruang yang menyerupai sel itu ialah ruang yang berada di lingkungan PT Pusaka Benjina Resources (PBR). Lokasi perusahaan yang bergerak di bidang penangkapan ikan itu ribuan mil dari kampung halaman mereka di Myanmar. Perusahaan tersebut berada di Desa Benjina, Kepulauan Aru, yang masih menjadi wilayah Indonesia.

Beberapa mil dari lokasi PBR, para pekerja dari berbagai negara tetangga tengah beraktivitas di atas kapal. Di tengah sengatan terik matahari dan bermandikan peluh, mereka menjerang ikan-ikan yang nantinya dipasok ke supermarket, restoran, dan toko-toko yang tersebar di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat (AS).

Saat seorang wartawan *Associated Press* (AP) mengunjungi lokasi PBR di Benjina, sejumlah pekerja imigran memelas meminta pertolongan. Para pekerja itu mengiba kepada wartawan AP agar membantu untuk memulangkan mereka ke negara asal.

"Saya ingin pulang. Kami akan melakukan apa pun," kata seorang pekerja asal Myanmar yang duduk di sisi kapal *boat*. Dia terus mengulang kalimat yang sama dengan berurai air mata.

"Sudah lama orangtua kami tidak lagi

agar berhati-hati dalam mengonsumsi ikan-ikan yang diperoleh secara tidak manusiawi.

Satu pekan setelah pemberitaan AP mengenai perbudakan di industri perikanan laut itu, delegasi Thailand dan pejabat Indonesia mengunjungi PBR. Mereka datang untuk membebaskan dan memulangkan sekitar 300 pekerja imigran ke negara masing-masing.

Selama ini, Thailand telah dimasukkan sebagai negara yang memiliki masalah dengan tingkat perdagangan manusia (*human trafficking*). Terungkap bahwa sejumlah pekerja Thailand yang menjadi pekerja di PBR menjadikan nama 'Negeri Gajah Putih' kian buruk.

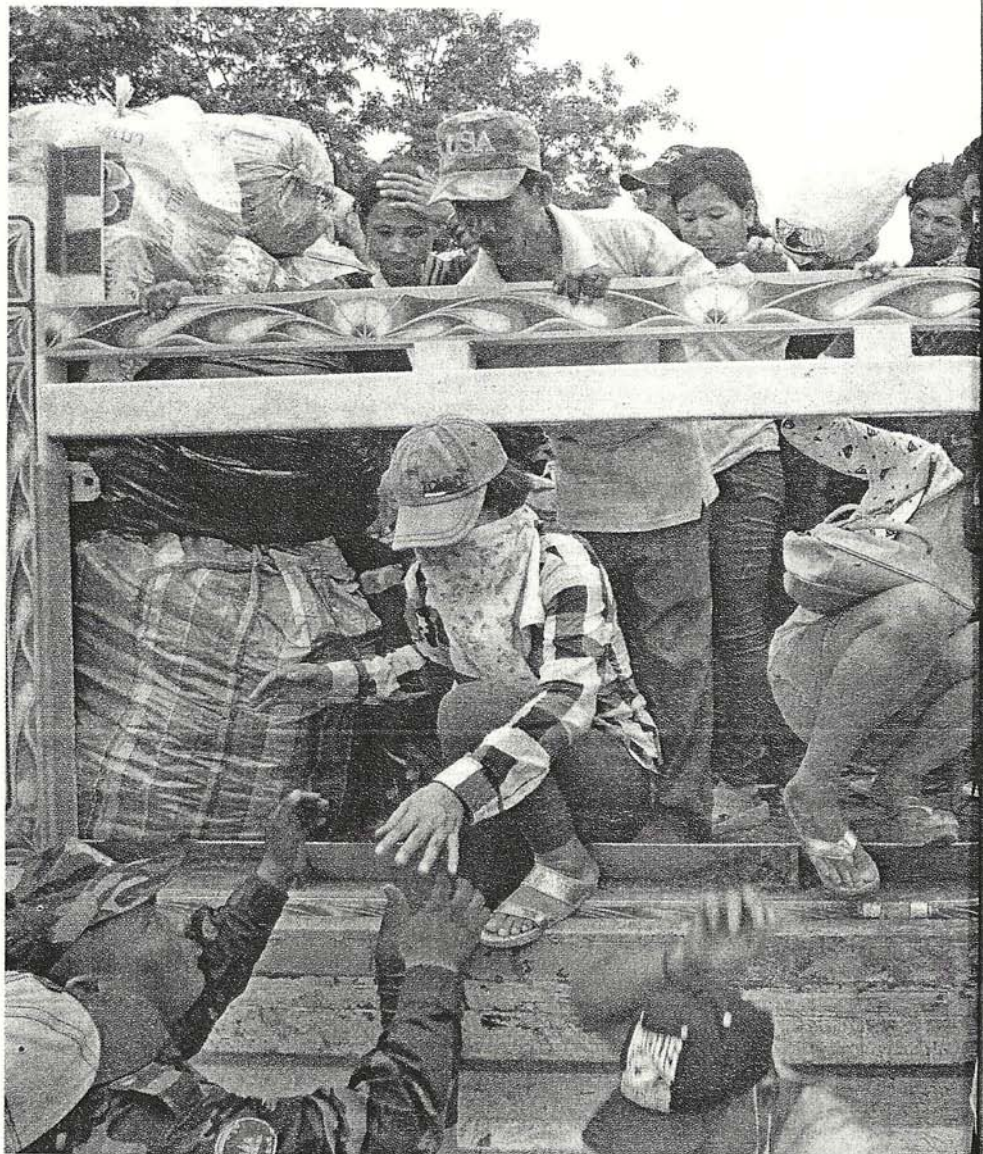
Bahkan, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengelompokkan Thailand bersama Iran, Kuba, Zimbabwe, dan Korea Utara sebagai negara yang memiliki masalah besar terkait dengan perbudakan. Tidak hanya Thailand, Asia Tenggara pun disebut sebagai kawasan yang subur praktik perbudakan.

Kamboja, Vietnam, dan Thailand terus mendapat sorotan terkait *human trafficking* yang menjadi bagian dari perbudakan. Setelah terjadi penyerangan terhadap etnik Rohingya di Myanmar, wajah Asia Tenggara kian tercoreng perbudakan.

Pasalnya, sejumlah perempuan Rohingya menjadi korban perdagangan seks dan kaum adamnya terjerumus perbudakan di industri perikanan. Di sisi lain, *trafficking* pengungsi Rohingya belum tuntas.

## Dari Thailand

Terkait dengan praktik perbudakan di ka-



**TIBA DI TANAH AIR:** Sejumlah pekerja migran asal Kamboja turun dari truk di perbatasan Kamboja-Thailand, beberapa waktu lalu. Sejumlah mengancam akan melakukan razia terhadap pekerja ilegal di negara itu yang disebut jumlahnya telah mencapai 160 ribu orang.

Myanmar dan Kamboja itu sebelumnya mencari pekerjaan di wilayah Thailand.

"Mereka dibohongi atau memang dipaksa bekerja di atas kapal," kata Lyth.

"Beberapa pekerja asalnya memang pergi dengan sukarela, tetapi kemudian mereka mendapat apa yang tidak mereka duga sebelumnya. Mereka harus bekerja selama bertahun-tahun di lautan dan tidak bisa pulang ke negara asal mereka," jelas Lyth.

Para cukong penyalur yang merekrut para pekerja asal Kamboja, Vietnam, dan

satu pulau ke pulau lain.

Menurut Lyth, praktik perdagangan manusia dan kerja paksa menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan di industri perikanan di kawasan Asia Tenggara.

Namun, dia menegaskan praktik penyimpangan hak asasi manusia itu tidak lepas dari praktik serupa di sektor perkebunan, manufaktur, konstruksi, dan pekerjaan rumah.

Maraknya migrasi tenaga kerja dari satu negara ke negara lain, tegas Lyth, disebabkan kondisi perekonomian di kawasan Asia

menunjukkan praktik ilegal itu menguntungkan lebih dari US\$150 miliar. Tak pelagi, *human trafficking* yang terkait dengan perbudakan menjadi salah satu indikator kriminal terbesar di dunia.

Di kawasan Asia Pasifik, tercatat sel 11,7 juta orang menjadi korban perdagangan manusia. Jumlah itu merupakan angka tertinggi di kawasan mana pun di dunia.

Perbudakan di era modern yang mengkhawatirkan berada di subregi besar Mekong (CMS) yang meliputi Ka-



## ■ Illegal Fishing



MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN (KKP) SUSI PUDJIASTUTI (KIRI) DIDAMPINGI KETUA SATUAN TUGAS PEMBERANTASAN ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED FISHING MAS AHMAD SANTOSA

Ratusan ABK asing disekap perusahaan asal Thailand di Kepulauan Aru dan dijadikan budak. Bag yang melawan dikurung dalam sel super sempit. Selain itu petugas juga menemukan kuburan massal. Bagaimana dengan nasib ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal asing?

Ruangan itu sangat sempit. Ukurannya sekitar 2 X 4 meter. Bagian dalamnya sangat kotor dan jorok. Jauh kalah bersih dari toilet umum di terminal bus yang ada di Jakarta. Dengan terali besi sudah coklat karena karat untuk mengurung penghuninya, sel yang digunakan untuk menghukum nelayan yang dipekerjakan PT Pusaia Benjina Resources (PBR) itu memang terlihat semakin mengerikan.

Sel mengerikan itu lah yang menggemparkan dunia pada dua pekan lalu.

# Perbudakan Nelayan di Kepulauan Aru

Kegempuran itu terjadi setelah Associated Press (AP) menampilkan foto dramatis seorang anak buah kapal (ABK) berkebangsaan Myanmar yang duduk di belakang sel besi tersebut. Dan bermula dari foto itu lah kemudian terungkap adanya praktik perbudakan sekejam zaman batu di Kepulauan Aru, Maluku, Indonesia.

Foto itu tidak saja membuat publik gempar tapi juga mempermalukan para pejabat Indonesia. Aparat kepolisian yang bertanggung jawab dengan atas penegakkan hukum di Kepulauan Aru akhirnya bergerak. Mereka menyerbu Benjina, tempat operasional PT PBR. Ratusan nelayan asing yang menjadi korban perbudakan akhirnya dibebaskan aparat gabungan. Selain itu kepolisian juga mengamankan sejumlah orang dari pihak perusahaannya, Jumat dua pekan lalu.

Kapolres Kepulauan Aru AKBP Harold Huiwe, sebagaimana dikutip sejumlah situs berita, Senin pekan lalu, menyebutkan bahwa pihaknya telah menahan seorang pria bernama Yopi. Lelaki berusia 35 tahun itu disebut-sebut sebagai algojo yang selama itu melakukan penangkapan terhadap ABK asing yang dipekerjakan perusahaan asing milik pengusaha Thailand tersebut. Yopi menurutnya diancam pasal 351 KUHP.

Bagaimana Yopi melakukan penangkapan? Menurut Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Asep Burhanuddin yang ikut turun bersama Tim Satgas Illegal Unreported Unregulated (IUU) Fishing menyebutkan penangkapan itu tidak saja melalui pemukulan tapi juga penyetruman dengan arus listrik. "Korban ngakunya disetrum dan disiksa," jelas Asep Sabtu dua pekan lalu.

Sehari setelah Asep mengungkapkan teknik penangkapan sang algojo di Penambulai Kepulauan Aru, Tim Satgas kembali menemukan fakta mengerikan praktek perbudakan yang dilakukan PT PBR. Satgas menemukan penjara yang fotonya menggemparkan tersebut. Tidak hanya satu, tapi dua penjara. Kedua penjara itu letaknya berdampingan dengan ruang mayat yang tak kalah sempit yang berisi satu meja tak terurus untuk meletakkan mayat.

Selain menemukan dua penjara sempit Satgas yang dipimpin Mas Achmad Santosa, juga menemukan kuburan massal. Kuburan itu terdapat di bawah pepohonan kelapa, dan semak-semak. Sedikitnya terdapat 77 nisan tertancap di atas kuburan. Semuanya ABK asing. Belum diketahui pasti apa penyebab kematian para ABK tersebut, apakah karena perbudakan atau yang lainnya.

Mas Achmad Santosa kepada wartawan di Jakarta mengatakan, terlalu dini untuk menyimpulkan temuan tersebut. Saat ini pihak kepolisian sedang menangani kasus ini, sehingga polisi akan menyampaikan hasil penyelidikan Presiden RI Joko Widodo, juga telah mengintruksikan untuk membentuk Tim Khusus Kasus Benjina dan Illegal Fishing di Maluku.

Seiring terbongkarnya perbudakan di Benjina, pihak imigrasi mulai melakukan proses pemulangan nelayan WNA asal Kamboja, Myanmar Laos dan Thailand Selasa pekan lalu. Pemulangan awal dilakukan bagi 10 warga Thailand dari Kota Tual menuju Kota Ambon. Pemulangan ke-10 warga Thailand sebagai tindak lanjut kedatangan Kedubes Thailand untuk Indonesia dan Wakil Kepala Kepolisian Thailand yang mengunjungi Benjina.

Pihak imigrasi mengaku terus melakukan pendataan para WNA di lokasi penampungan PPN Dumar Tual. Mantan ABK yang bekerja bagi PT PBR tersebut masih terus mendapatkan pelayanan Kesehatan oleh Dinas Kesehatan Kota Tual. Pihak Kedubes dan Kemenlu RI yang diminta keterangan wartawan menutup diri untuk berkomentar, bahkan diliput saat melakukan rapat tertutup. "I'm sorry no, media," ucap seorang perwakilan Kemenlu RI kepada wartawan.

Dari pendataan resmi, jumlah ABK di PPN Dumar berjumlah 232 orang. Penambahan ini setelah dilakukan pendataan ulang oleh petugas Imigrasi. Jumlah itu bertambah setelah terdapat 24 ABK baru asal Myanmar tiba dari Dobo. Kepala Sta-

siun PSDK Mochtar, ratusan WNA yang diamankan di PPN Dumar itu masih dilakukan verifikasi dokumen kenegaraan mereka. "Saat ini masih dilakukan pendataan oleh kedubes masing-masing," paparnya.

Salah satu dari 24 ABK asal Myanmar yang baru tiba mengaku dirinya bernama ABK lain merupakan WNA yang telah lari lebih awal meninggalkan perusahaan. "Saya sudah kerja sejak 2009, kami ini yang sudah lari lebih awal dari Benjina," ungkap Lai Mi, ABK asal Myanmar yang mahir berbahasa Indonesia saat berbincang-bincang sejumlah wartawan di PPN Dumar.

Dia mengakui, lari dari kapal karena adanya perlakuan diskriminasi oleh pihak perusahaan. Bekerja sebulan penuh di atas kapal, tetapi pengajian tidak jelas. Satu bulan di laut, gaji satu juta rupiah. Waktu sakit tidak diberi kesempatan beristirahat. Sering dipukul jika kedatangan beristirahat. Bahkan salah satu teman sekapal yang merupakan juru masak kapal pernah diistruksi hingga menderita luka serius.

Pria berumur 29 tahun inipun menuturkan, dirinya dan 23 rekan ABK lain yang melarikan diri dari perusahaan memilih tinggal di hutan. Ada pula yang berkenalan dengan warga Aru sehingga diperbolehkan tinggal bersama warga di bawah desa di Kepulauan Aru. "Kami setelah mendengar ada rencana pemulangan ABK Myanmar langsung kami turun

dari desa-desa dan tempat persembunyiannya dan berkumpul dengan rekan lain," tuturnya.

Sementara itu secara terpisah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti justru risau. Pasalnya, gara-gara hal itu, Susi jadi memikirkan nasib warga negara Indonesia (WNI) korban perbudakan di kapal-kapal asing. "Persoalan sekarang ini yang kita semua harus khawatirkan, berapa banyak selutusnya ABK Indonesia di kapal ikan di seluruh dunia. Bagaimana kita cari tahu, dari mana kita tahu?" ucapnya. Rabu pekan lalu.

Susi pun mengaku khawatir tidak tertutup kemungkinan banyak orang Indonesia menjadi budak-budak di kapal asing, yang berlayar bukan di perairan Indonesia. Dia bilang, jika modus operannya yang digunakan oleh para pelaku perbudakan sama seperti yang dilakukan oleh PBR, kemungkinan orang-orang Indonesia dijual dengan paksaan dan penipuan.

Susi bilang, bisa jadi mereka direkrut dan dijanjikan bekerja di Bangkok. Ternyata, mereka dinaikkan ke atas kapal. Modus lain, yakni perdagangan manusia di bawah umur 18 tahun. "Sebetulnya masih banyak, ribuan orang Indonesia juga mengalami perlakuan sama seperti orang Myanmar (diperbudak Benjina). Tapi kita tidak tahu caranya. Cara untuk tahu bagaimana? Karena, kita tidak tahu mereka direkrutnya dari mana, dan lewat mana," kata Susi.

Nah, [www.war.com](http://www.war.com)



SEJUMLAH ABK WARGA NEGARA (WN) THAILAND, SEDANG MENIKMATI MAKAN SIANG. SEBANYAK 68 ABK WN THAILAND DI AMBON TERKAIT MASALAH PERBUDAKAN DI KAWASAN BENJINA, KEPULAUAN ARU



# Almost 550 slaves found on Benjina

Margie Mason and  
Robin McDowell

ASSOCIATED PRESS/JAKARTA

The number of enslaved fishermen found on a remote Indonesian island has now reached nearly 550, after a fact-finding team returned for a single day to make sure no one had been left behind nearly a week after more than half of the men were removed in a dramatic rescue.

Many of the 210 identified Thursday were Myanmarese who wanted to leave, but there were a few holdouts — men who claimed they were owed years of back pay from their bosses, said Steve Hamilton, deputy chief of mission at the International Organization for Migration in Jakarta.

An in-depth investigation by the Associated Press published last month led to the discovery of massive rights abuses in the island village of Benjina and surrounding waters. The report traced slave-caught seafood from there to Thailand

where it can then enter the supply chains of some of America's biggest supermarket chains and retailers.

Many of the men interviewed said they had been tricked or even kidnapped before being put on boats in Thailand and taken to Indonesia. They were forced to work almost non-stop under horrendous conditions, some brutally beaten by their Thai captains when they were sick or caught resting.

Last week, Indonesian authorities rescued around 330 migrants from Benjina, bringing them to the island of Tual, where they are now being sheltered by the government. Those found Thursday by a team, which included Myanmar officials, remain in Benjina.

It is unclear who will pay for the mass repatriation. A former slave now in Tual said conditions were relatively good there. He said the men were getting medical care and enough to eat, but their living quarters were cramped and many did not

have a change of clothes since they left quickly with only what they were wearing.

President Joko "Jokowi" Widodo has ordered his administration to form a special team to handle the slavery case.

"What we are doing about the Benjina situation will become an international benchmark, [showcasing] the seriousness of Indonesia in addressing illegal fishing and slavery," Maritime Affairs and Fisheries Minister Susi Pudjiastuti said on Tuesday.

She explained that local fisheries products were at risk of being boycotted by the international community if the government failed to show commitment in cracking down on forced labor in the fisheries sector.

Susi pointed out that Indonesia's position on forced labor was clear, as the government had long ratified the International Labour Organization's (ILO) 1957 Convention on the Abolition of Forced Labor in Law

No. 19/1999.

In his speech before the meeting, Jokowi reminded ministers and officials involved to maintain what he lauded as good work in combating illegal fishing.

"If we look back at the last couple of months, what we've done in terms of law enforcement [was] a job well done and this needs to be maintained," he said.

Meanwhile, Myanmar opposition leader Aung San Suu Kyi said Thursday in her country's capital, Naypyitaw, it was up to governments "to protect the rights of the citizens and to bring them back out of bondage".

"That is the most obvious and very simple solution and unavoidable duty of any responsible government," she told reporters.

While most fisherman found in Benjina were Myanmarese, there also were scores of Cambodians. The toll of 550 did not include men — many of whom also were enslaved — from poor parts of Thailand.



# Komnas HAM Selidiki Kasus Benjina

AMBON, KOMPAS — Tim dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Polri akan melakukan penyelidikan atas dugaan perbudakan dan sejumlah pelanggaran hukum lainnya oleh PT Pusaka Benjina Resources, perusahaan perikanan yang berpusat di Pulau Benjina, Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku.

Hal tersebut diungkapkan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tual Mukhtar saat dihubungi *Kompas* dari Ambon, Jumat (10/4). Kedua tim tiba di sana pada Sabtu ini. "Mereka akan ke tempat kami untuk mengambil data yang diperlukan," ujar Mukhtar.

Seperi diberitakan Associated Press, ada anak buah kapal (ABK) asal Myanmar yang mengaku diperlakukan tidak manusiawi, antara lain dipaksa bekerja 20-22 jam per hari, dikurung, disiksa, dan tidak diberikan upah. Dugaan itu dibantah PT Pusaka Benjina Resources.

Selain itu, dari catatan *Kompas*, juga terjadi pungutan liar terhadap kapal milik PT Pusaka Benjina Resources dan sejumlah

kapal di sana. Pungutan liar itu melibatkan oknum pengawas perikanan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Imigrasi, Karantina, syahbandar, Bea dan Cukai, Polri, serta TNI.

Setiap kapal yang mengajukan surat laik operasi (SLO) diwajibkan membayar Rp 250.000. Terdapat lebih dari 80 kapal yang berada di sana.

Tidak hanya SLO, oknum pengawas perikanan juga mewajibkan setiap kapal ekspor membayar Rp 5 juta. Setiap bulan, lebih dari empat kapal ekspor bertolak dari Benjina. Pungutan liar itu marak sebelum Pemerintah Indonesia gencar melakukan pemberantasan penangkapan ikan secara ilegal pada era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Pelaksana Tugas Kepala Kantor Komnas HAM Provinsi Maluku Benediktus Sarkol mengatakan, Komnas HAM akan fokus pada dugaan perbudakan.

Selain terhadap ABK asing, kemungkinan hal yang sama menimpa ABK asal Indonesia.

Sementara itu, pihak kepoli-

sian belum bisa dikonfirmasi terkait dengan rencana penyelidikan tersebut.

## ABK asing

Mukhtar menambahkan, ABK asing yang ingin pulang ke negara asal mereka masih terus bertambah. Saat ini terdapat 347 ABK asing yang diinapkan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tual, terdiri dari 281 warga asal Myanmar, 58 warga Kamboja, dan 8 warga Laos.

"Masih ada 958 ABK asing di Benjina, terdiri dari 746 orang asal Thailand, 176 orang asal Myanmar, dan 36 orang asal Kamboja. Selain itu, masih banyak lagi yang bersembunyi di hutan atau di rumah-rumah penduduk setempat," ungkapnya.

Isu soal perbudakan itu sudah lama mencuat dan menjadi berita di beberapa media Thailand. Akan tetapi, kasus itu diduga dilakukan di kapal. Baru belakangan hal itu ditangani secara cepat karena kasus ini berada di darat. Salah satu media asing melaporkan kasus ini sehingga mendapat perhatian dari berbagai kalangan. (FRN)